
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)

Leni Sofiyani¹⁾, Subadriyah²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{1) 2)}

161120001845@unisnu.ac.id¹⁾, subadriyah@unisnu.co.id²⁾

Abstrak

This study aims to find out and analyze whether Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, affects District / City Spending in Central Java Province. The analysis method used is a quantitative method, with multiple regression testing by conducting a classical assumption test before getting the best research model. The variables in this study are Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund as independent variables, while dependent variables are Regional Spending. The population is the entire city regency in Central Java Province as many as 35 regencies / cities. The data used in this study is data taken from 2016 to 2018. The data analyzed in this study is secondary data sourced from the District / City APBD Realization Report in Central Java Province obtained from the Local Government Financial Balance site on the internet (www.djpk.depkeu.go.id). From the data, then conducted a research analysis using multiple linear regression techniques with SPSS 23. The results of this study prove that The Regional Original Income has a positive impact on Regional Spending, the General Allocation Fund has no effect on Regional Spending, The Khusu Allocation Fund has a positive effect on Regional Spending.

Keywords: *Regional Spending, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Regional Original Income (PAD)*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah Belanja Daerah. jumlah populasinya adalah seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari situs Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet (www.djpk.depkeu.go.id). Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisis penelitian dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah(PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusu (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: *Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD),*

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

Corresponding author:

Subadriyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

subadriyah@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah untuk membiayai pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai setiap kegiatan. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang pemerintah daerah laporkan dalam APBD merupakan pengeluaran kas rutin untuk membiayai semua kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Fenomena yang sering dan umum dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perokonomian daerah (Maryati, 2010).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (A. Halim, 2004).

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin tinggi, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dapat diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah (Puspita Sari, 2010). Menurut Abdul Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Kawedar, Warsito, Abdul Rohman (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006), bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Bidang yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada Belanja Daerah Sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat/publik juga masih terjadi flypapereffect atau tidak. Hasil yang didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi flypapereffect, sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pekerjaan umum telah terjadi flypapereffect.

Penelitian lain dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), yang melakukan penelitian pada kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran Pemda untuk menentukan jumlah Belanja Daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan daripada DAU dan DAK, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU dan DAK lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pempus (salah satunya DAU) (Prakosa,2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Penelitian Nahlia (2014), Darmayasa (2012), Listiorini (2012), Mentayani, I. (2012), dan Maimunah menyimpulkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi (Indah Rahmawati, 2010). Melihat beberapa hasil penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariwijaya (2012) Listiorini (2012), Siagian (2009), Kusumadewi (2007), dan Maimunah (2006) menyimpulkan adanya hubungan yang searah antara DAU dan belanja daerah, di mana peningkatan DAU juga diikuti oleh kenaikan pengeluaran belanja. Puspita Sari (2010) mengemukakan bahwa dana alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Menurut Kuncoro (2011) salah satu persyaratan untuk menerima DAK adalah daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kebutuhan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nahlia (2014) menyimpulkan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah, namun tidak signifikan. Ketika terjadi peningkatan DAK, maka belanja daerah juga meningkat namun tidak signifikan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Listiorini (2012) menyimpulkan DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)”

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Abdul Halim, 2001).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut: Belanja Operasi, Belanja Modal & Belanja tak terduga.

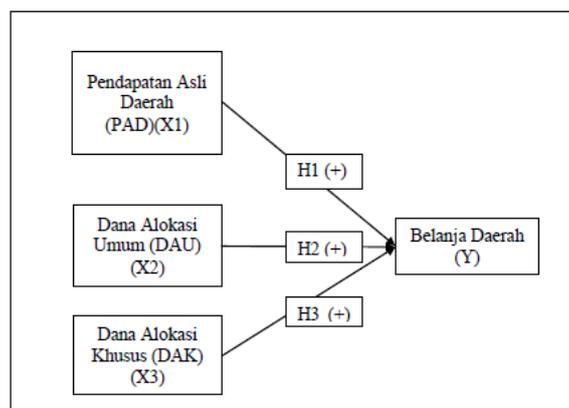
Bastian (2006), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pos penerimaan non pajak yang berhasil perusahaan milik negara, akumulasi dari pos penerimaan pajak daerah. Menurut Abdul Halim dan S. Abdullah (2006) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang sumber dari pendapatan ekonomi asli daerah. Menurut Isdijoso (2002), pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka waktu pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, dan pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pemerintah daerah yang berasal dari sumber ekonomi. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang penyelenggara daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga golongan retribusi daerah yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan daerahnya. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut: (a) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. (b) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas. (c) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk 47 Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (d) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas adalah proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (Abdul Halim, 2009).

Menurut A. Halim & Syam (2013), DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Berdasarkan Undang-Undang No. 104 Tahun 2000 Pasal 19 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.



Gambar 1. Kerangka Teoritis

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti (Sugiono, 2007).

Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apasaja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Pengujian ini untuk menganalisis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah.

Variabel Bebas (Independen) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun negatif bagi variabel dependen lainnya (Sugiyono, 2013). Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) dana alokasi umum (DAU), dan (3) dana alokasi khusus (DAK)

Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel-variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah.

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sekaran, 2017).

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu belanja langsung dan tidak belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang jasa atau modal (Nordawati, Deddy dan Hertianti, 2010). Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

Keterangan :

PAD : pendapatan asli daerah

HPD : hasil pajak daerah

RD : retribusi daerah

PLPD : pendapatan dari laba perusahaan daerah

LPS : lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengambil pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Besar kecilnya pendapatan menentukan kualitas pelaksanaan pemerintah, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik, serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (Mahmudi, 2015), sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PAD = PD + RD + HPKDYD + LPADYS$$

Keterangan :

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
HPKDYD	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
LPADYS	: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU ditetapkan sesuai formulasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum dihitung dengan menggunakan rumus :

$$DAU = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Keterangan :

Alokasi Dasar	: Gaji PNS daerah
Celah Fiskal	: Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal (KbF) dan Kapasitas Fiskal (KpF) dihitung berdasarkan rumus berikut;

$$KbF = TBR (\alpha IP + \alpha IW + \alpha IPM + \alpha IKK + \alpha IPDRB/kap)$$

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

Keterangan :

TBR	: total belanja rata-rata APBD
IP	: indeks jumlah penduduk
IW	: indeks luas wilayah
IPM	: indeks pembangunan manusia
IKK	: indeks kemahalan konstruksi
IPDBR/kap	: indeks produk domestik regional bruto per kapita
α	: bobot indeks
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DBH Pajak	: dana bagi hasil penerimaan pajak
DBH SDA	: dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam

Sumber : (Depkeu, 2009)

Menurut (Depkeu, 2009), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu jenis transfer dana perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kriteria umum menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{KDD} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

Dimana :

Penerimaan umum : PAD + DAU + (DBH-DBHDR)

Belanja Pegawai daerah : Belanja PNSD

Keterangan :

KKD : kemampuan keuangan daerah

PAD : pendapatan asli daerah

DAU : dana alokasi khusus

DBH : dana bagi hasil

BHDR : dana bagi hasil dana reboisasi

PNSD : pegawai negeri sipil daerah

Sumber : (Depkeu, 2009)

Jenis dan Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet (www.djpk.depkeu.go.id). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diartik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/ Kota.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet (www.djpk.depkeu.go.id). Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Imam Ghazali, 2013). Analisis regresi linier berganda mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Model regresi dalam alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 23. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 2017).

HASIL

Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016 sampai dengan 2018, maka dapat diperoleh statistik deskriptif yaitu minimum, maximum, mean, dan standar deviasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Unstandardized Residual	105	-2141224251108,19730	954704926734,82540	-,0001221	379489512768,92834000
DAK	105	0	483813000000	2669268090	114111361483,79193,05
PAD	105	171277218774	1836015590352	3837741626	288713410621,42651,72
DAU	105	97953000000	92668268264901	1817929304	8955393811125,092
Valid N (listwise)	105			708,06	

Sumber : Data yang diolah 2020

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel prnggagu atau residual memiliki distribusi normal.berikut adalah hasil uji normalitas kolmorogrov normalitas sebagai berikut :

Tabel 2. Uji Kolmorogrov Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	105
Normal Parameters ^a ,	Mean
b	-,0001221
Most Extreme Differences	Std. Deviation
	379489512768,92834000
	Absolute
	,106
	Positive
	,071
	Negative
	-,106
Test Statistic	,106
Asymp. Sig. (2-tailed)	,060 ^c

a. Test distribution is Normal.

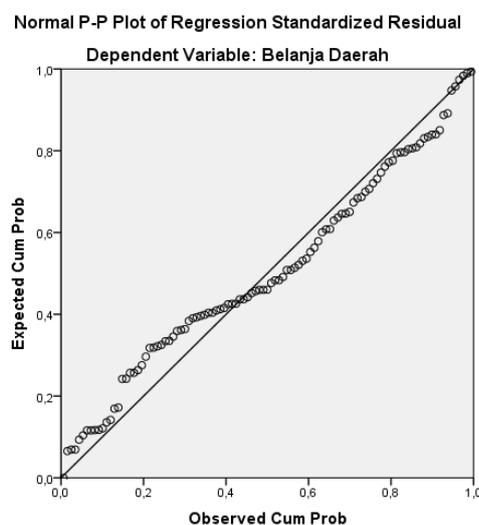
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data yang diolah 2020

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel diatas terlihat bahwa semua variabel residual dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,06 yaitu lebih besar dari 0,05 (0,06 >

0.05). Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga analisis regresi ini dapat dilaksanakan.



Gambar 2. Normal Probability Plot
 Sumber : Data yang diolah 2020

Berdasarkan keterangan gambar grafik diatas, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan menggunakan model regresi dan melakukan korelasi antar variabel independen dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7412821078	1084281309		6,837	,000		
		82,452	35,324					
	PAD	1,448	,131	,633	11,055	,000	,997	1,003
	DAU	,001	,004	,019	,323	,748	,991	1,009
	DAK	3,007	,332	,519	9,059	,000	,994	1,006

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
 Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan Tabel 3 diatas terlihat bahwa seluruh Variabel independen yaitu PAD,DAU, dan DAK memiliki angka Variance Inflation Factors (VIF) dibawah 10 dengan angka tolerance

yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang berbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas anatar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Weston, bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,819 ^a	,670	,660	385084254524, 687	1,882

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

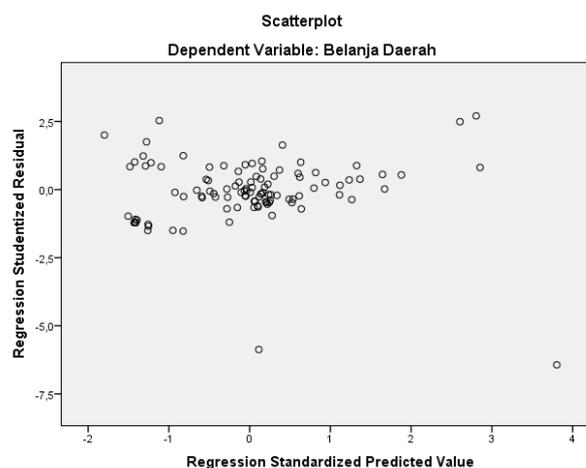
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data diolah 2020

Nilai DW sebesar 1,882, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5% jumlah sampel sebesar 105 (n) dan jumlah variabel sebesar 3(k=3). Nilai DW 1,88 lebih besar dari batas atas (du) 1,74 dan lebih kecil dari 2,26 (4-du), maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Didalam pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada Scatterplot. Berdasarkan Pengujian SPSS diperoleh grafik Scatterplot sebagai berikut :



Gambar 3. Scatterplot

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas dan teratur, secara titik tersebut diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi

Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen hubungan positif atau negatif. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan SPSS *Statistic 23* adalah sebagai berikut :

Koefisien Determinasi

Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya belanja daerah yang dipengaruhi variabel-variabel bebasnya.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of theEstimate
1	,819a	,670	,660	385084254524, 687

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU
Sumber : Data yang diolah 2020

Pada table 5 menunjukkan bahwa koefisien determinasi ditunjukkan dari nilai *adjusted R²* sebesar 0,660 hal ini berarti 66,0% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sisanya (100% - 66,0% = 34%) dijelaskan sebab yang lain dari luar model.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t ini bertujuan untuk menentukan pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut :

Tabel 6. Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Toleran ce	VIF
1	(Constant)	7412821078	1084281309					
		82,452	35,324		6,837	,000		
	PAD	1,448	,131	,633	11,055	,000	,997	1,003
	DAU	,001	,004	,019	,323	,748	,991	1,009
	DAK	3,007	,332	,519	9,059	,000	,994	1,006

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
Sumber : Data yang diolah 2020

Dari perhitungan statistik tersebut maka dapat menunjukkan bahwa dua variabel independen yang dimasukkan kedalam model signifikan mempengaruhi belanja daerah dan satu variabel lainnya tidak mempengaruhi belanja daerah. Variabel independen tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedua Variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,005, dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikan sebesar 0,748 lebih besar dari tingkat signifikan 0,005. Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan dibawah ini :

$$\text{Belanja Daerah} = 741282107.882 + 1,448 \text{ PAD} + 0,001 \text{ DAU} + 3,007 \text{ DAK}$$

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil output SPSS terdapat nilai t hitung pada variabel PAD lebih besar dari t tabel ($11,055 > 1,983$) dengan nilai tingkat signifikan dibawah 0,005 yaitu nilai signifikan variabel PAD pada tabel 4.3.3.2 adalah 0,000. Nilai t hitung pada variabel DAU lebih kecil dari t tabel ($0,323 < 1,983$) dengan nilai signifikan diatas 0,005 yaitu nilai signifikan pada tabel 6 adalah 0,748. Dan nilai t hitung pada variabel DAK lebih besar dari t tabel ($9,059 > 1,983$) dengan nilai signifikan dibawah 0,005 yaitu nilai signifikan pada tabel 6 adalah 0,000. Berdasarkan cara pengambilan uji t dalam analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut : Variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah, variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah, dan variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat terkait dalam kemandirian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber dari bantuan, maka akan semakin leluasa untuk mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai korelasi positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat t hitung sebesar 11,055 lebih besar dari t tabel 1,983. Sedangkan tingkat signifikansinya dibawah 0,005 dengan nilai signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang nyata terhadap belanja daerah dan memiliki pengaruh positif.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah untuk pemerataan keuangan antar daerah yang bersifat block-grant, yang berarti penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan pengeluaran belanja daerah. Dari hasil penelitian ini variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan t hitung sebesar 0,323 lebih kecil dari t tabel 1,983 dan dengan nilai tingkat signifikansi t 0,748 diatas dari tingkat signifikansi 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Nur (2015), Pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan desa, belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/kota dan pemerintah desa berjalan tidak disangka. Di Indonesia setiap tahun terjadi peningkatan belanja daerah utamanya belanja rutin disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak signifikan, jika dibandingkan dengan gaji pegawai tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan t hitung Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 9,059 dengan nilai signifikan dibawah 0,005 yaitu dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat khusus karena tujuan penggunaannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Alokasi khusus dalam hal ini adalah alokasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian terdahulu dan fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda menggunakan pengolahan data SPSS 23 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga akan semakin tinggi. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemandirian suatu daerah tidak menjadi lebih baik dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) bahkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah semakin tinggi, akan tetapi pada kenyataannya semakin besar dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Sumber keuangan Pendapatan (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu sumber untuk membiayai Belanja Daerah. Untuk kemandirian suatu daerah diharapkan daerah tersebut mengutamakan sumber keuangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan otonomi daerah guna mensejahterakan masyarakat daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan bisa mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar terus mengupayakan untuk dapat bisa menarik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk dialokasikan pada sektor publik agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi penerimaan daerah. dan pemerintah mesti objektif dan selektif dalam pelaksanaan belanja daerah agar sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih dan mengambil obyek penelitian selain Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Ariwijaya, D. (2012). *No Title*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Bambang Prakosa, K. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*, 8(2).

Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

- Darmayasa, I. N. dan I. M. S. 2012. (2012). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Bali). *Jurnal Bisnis Dn Kewirausahaan*, 8(2), 149–157.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. dan S. A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Halim, A., & Syam, K. M. (2013). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2001). Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *KOMPAK STIE Yogyakarta*.
- Halim, Abdul. (2009). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
- Indah Rahmawati, N. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah*. Undip Semarang.
- Isdijoso, B. (2002). Analisis Kebijakan Fidkal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di kota Surakarata). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1).
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan S. H. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Undip.
- Kuncoro, M. (2011). *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?* (Edisi Pert). Salemba Empat.
- Kusumadewi, D. A. dan A. R. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67–80.
- Listiorini. (2012). Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 4(2), 111–126.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. In *Symposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Maryati, U. dan E. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(2).
- Mentayani, I., N. H. dan R. (2012). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli

Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal SPREAD*, 2(1), 55–64.

Nahlia, F. (2014). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provininsi Kepulauan Riau Periode 2007-2012. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)*.

Nordiawan, Deddy dan Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Salemba Empat.

Perimbangan, D. K. R. I. D. J., & Keuangan. (2009). *Laporan APBD*.

Puspita Sari, N. dan I. Y. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung*. Universitas Sumatera Utara Medan.

Sekaran, U. dan R. B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6). Salemba Empat.

Siagian, P. A. (2009). *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara*. Universitas Sumatera Utara Medan.

Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Admnistrasi*. CV Alfa Beta.